

Strategi Pemerintah NTB Dalam Mencegah Konflik WNA dan Masyarakat Provinsi NTB Guna Mendukung Keamanan Nasional

Shelvy Nujuliyani¹ Djayeng Tirto S.² Yulian Azhari³ Pujo Widodo⁴ Herlina Juni Risma Saragih⁵ Achmed Sukendro⁶

Program Studi Magister Damai dan Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan Republik Indonesia^{1,2,3,6}

Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Republik Indonesia^{4,5}

Email: nujuliyanis@gmail.com¹ djayengtirto83@gmail.com² azhariyulian6@gmail.com³ pujowidodo78@gmail.com⁴ herlinsara897@gmail.com⁵ achmedsukendro@gmail.com⁶

Abstrak

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang terkenal dengan keindahan alam yang memukau, sehingga menjadikannya sebagai destinasi wisata populer baik dalam skala nasional maupun internasional. Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu tujuan wisata favorit bagi wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pertumbuhan sektor pariwisata di NTB memberikan dampak positif, seperti peningkatan pendapatan daerah dan ekonomi bagi masyarakat NTB. Namun, kedatangan wisatawan asing juga dapat menimbulkan konflik yang disebabkan oleh perubahan perilaku sosial oleh warga asing pada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun strategi yang tepat dan efektif untuk mencegah potensi konflik antara warga negara asing dan masyarakat NTB. Para peneliti telah meneliti lebih dalam tentang strategi yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi NTB dan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dalam mencegah konflik melalui teori CEWERS.

Kata Kunci: Ancaman, Konflik, Warga Negara Asing, Masyarakat NTB, Pemerintah.

Abstract

Indonesia is an archipelagic country renowned for its stunning natural beauty, making it a popular tourist destination both nationally and internationally. West Nusa Tenggara (NTB) is one of the favorite tourist destinations for both domestic and foreign visitors. The growth of the tourism sector in NTB has had a positive impact, such as increasing regional income and improving the economy for the NTB community. However, the arrival of foreign tourists can also cause conflicts due to changes in social behavior by foreign citizens towards the local community. Therefore, the government needs to develop appropriate and effective strategies to prevent potential conflicts between foreign nationals and the NTB community. Researchers have studied in more depth the strategies used by the NTB Provincial Government and the Foreigner Supervision Team (TIMPORA) in preventing conflicts through the CEWERS theory.

Keywords: Threat, Conflict, Foreign Nationals, NTB Society, Government.



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di seluruh wilayah nusantara. Luas wilayah Indonesia mencapai sekitar 5,1 juta kilometer persegi dan memiliki garis pantai yang panjangnya lebih dari 54.000 kilometer. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah seperti hutan tropis, gunung berapi, dan lautan yang indah. Keanekaragaman hayati yang dimilikinya juga sangat tinggi, bahkan Indonesia menjadi salah satu negara megadiversitas di dunia. Sjahriful (1993:8) menyatakan bahwa Indonesia dari Sabang sampai Merauke merupakan negara yang subur, kaya akan sumber daya alam seperti bahan baku dan rempah-rempah, dan memiliki potensi alam berupa daratan dan lautan untuk dapat dieksplorasi, sehingga banyak wisatawan asing yang masuk ke Indonesia untuk berbagai keperluan seperti: bekerja, penelitian, bahkan hanya untuk menikmati keindahan alam Indonesia.

Indonesia terkenal dengan keindahan alamnya, dan salah satu destinasi pariwisata yang terkenal hingga ke mancanegara adalah Bali. Sebagai salah satu daerah tujuan wisata terkenal di dunia, Bali memiliki banyak daya tarik baik dari segi alam maupun budaya. Sumber daya alam dan budaya Bali menarik tidak hanya bagi wisatawan domestik, tetapi juga wisatawan mancanegara. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Bali setiap tahunnya (Wijaya dan Kanca, 2019).

Meskipun begitu, Bali bukanlah satu-satunya destinasi pariwisata andalan Indonesia. Nusa Tenggara Barat (NTB) kini juga menjadi destinasi wisata yang populer di kalangan turis mancanegara karena terdiri dari dua pulau yang terkenal dengan pesona keindahan alam serta budayanya yang tak kalah menarik dengan Bali, yaitu pulau Lombok dan pulau Sumbawa. Potensi wisata yang dimiliki oleh NTB menjadi daya tarik pariwisata, yang terbukti dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.

Wisatawan mancanegara atau orang asing merupakan warga negara asing yang bertempat tinggal pada negara tertentu. Keberadaan orang asing ini memerlukan pengawasan agar tidak mengganggu ketentraman, kenyamanan atau kesejahteraan umum masyarakat NTB (Tutik, 2008). Keberadaan orang asing dapat berpotensi memunculkan konflik yang terjadi, pasalnya kedatangan orang asing kerap kali membawa budayanya yang memiliki perbedaan budaya dengan yang dimiliki oleh masyarakat NTB.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Riduan (2013:51) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi yang relatif alami atau *natural setting*. Hal ini berarti penelitian dilakukan dalam konteks yang mirip dengan kondisi aslinya, sehingga hasil penelitian bisa dianggap mewakili fenomena yang terjadi di dunia nyata. Penelitian kualitatif juga melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan partisipan penelitian, sehingga data yang dikumpulkan bersifat personal dan kontekstual.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berfokus pada aspek kualitatif dari data yang dikumpulkan seperti dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mendapat informasi dari sumber tertulis. Jenis dokumen yang dapat menjadi data penelitian dapat berupa gambar, tulisan atau karya seseorang. Dokumentasi dapat bersifat resmi berupa undang-undang, surat keputusan, memo, surat kegiatan yang dikeluarkan oleh suatu instansi. Selain itu, dokumen dapat bersifat pribadi seperti autobiografi, surat pribadi serta catatan harian (Mardawani, 2020).

Sedangkan wawancara merupakan suatu interaksi antara peneliti dengan responden yang bertujuan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian. Data yang didapat dalam wawancara merupakan data mentah yang kemudian akan diolah oleh peneliti (Stedward, 1997). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan *face-to-face* melalui media aplikasi *zoom meeting* dengan narasumber: Ngurah Mas Wijaya Kusuma, S.H., M.H., (Kepala Bidang Intelejen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham NTB); Lalu Abdul Wahid S.H., M.H., (Kepala Kesbangpol NTB); dan Kombespol Hendro Kusmayadi, S.IK., M.H. (Direktur Intelkam Polda NTB).

Teknik analisis data yang kemudian digunakan oleh peneliti ialah teknik analisis data menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014) di mana meliputi:

- a. pengumpulan data meliputi data yang diperoleh dari dokumentasi dan wawancara;
- b. reduksi data adalah memilih data yang relevan dengan penelitian.;
- c. penyajian data dapat berbentuk tulisan, gambar, tabel dan grafik;
- d. penarikan kesimpulan dilakukan ketika semua data terhimpun dan menjadi hasil penelitian.

Pariwisata dan Potensi Konflik di NTB

Pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah (Undang-undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan). Industri pariwisata di Indonesia harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, Pariwisata yang terkelola dengan baik dapat menjadi sektor utama atau sektor unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian daerah.

Pengembangan pariwisata merupakan suatu upaya yang terkoordinasi guna menarik wisatawan serta menyediakan sarana dan prasarana, seperti penyediaan barang atau jasa serta fasilitas lain yang diperlukan dalam melayani kebutuhan wisatawan. Semua bentuk kegiatan pengembangan pariwisata mencakup berbagai aspek baik dari sisi pelayanan (service) atau cindera mata. Dengan demikian, pengembangan pariwisata merupakan kegiatan atau usaha yang terkoordinasi guna mengatur hal yang belum ada guna memajukan atau memperbaiki bahkan meningkatkan sesuatu yang telah ada, meliputi kemasyarakatan dengan senantiasa memperhatikan mutu lingkungannya (Kastolani, 2017).

Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah salah satu Provinsi yang memiliki potensi pariwisata yang cukup menjanjikan di mana memiliki daya tariknya tersendiri dengan perpaduan keindahan alamnya meliputi pantai dan pegunungannya serta keragaman seni budayanya dan juga adat istiadat yang menjadikan daerah ini sebagai salah satu destinasi wisata yang ideal. Hal ini menjadikan NTB sebagai salah satu tujuan wisatawan mancanegara. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data wisatawan mancanegara di NTB:

Tabel.1 Data wisatawan mancanegara di NTB 2018-2022

Tahun	Jumlah Wisatawan Mancanegara
2018	1.204.556
2019	1.550.791
2020	39.982
2021	11.890
2022	126.539

Sumber : Statistik Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa NTB merupakan destinasi pilihan bagi wisatawan mancanegara. Kendatipun sempat mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020 yang disebabkan atas terjadinya pandemi covid-19, namun pada tahun 2022 jumlah wisatawan di NTB berangsur kembali meningkat. Peningkatan ini juga meningkatkan perekonomian pasca-pandemi hal ini terbukti dengan NTB memperoleh pendapatan daerah sebesar Rp. 5,29 Triliun atau mencapai 93.32 persen dari target yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur sebesar Rp. 5,67 Triliun (Bappeda NTB, 2022).

Kendatipun demikian, peneliti melihat pengembangan sektor pariwisata di NTB ini bagaikan pisau bermata dua. Pada sisi satu, sektor pariwisata membawa dampak positif dalam meningkatkan pendapatan daerah dan mengembangkan perekonomian masyarakat NTB namun, disisi lain kedatangan wisatawan mancanegara ini dapat memunculkan konflik yang ditimbulkan atas perubahan perilaku sosial masyarakat NTB.

Perilaku sosial menurut Hurlock (2003:261) merupakan kemampuan untuk menjadi orang yang bermasyarakat. Perilaku sosial adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku yang ditunjukkan oleh individu dalam masyarakat, yang pada dasarnya sebagai respons terhadap apa yang dianggap dapat diterima atau tidak dapat diterima oleh kelompok. Perilaku sosial merupakan perilaku seseorang yang dapat diperoleh melalui dua kemungkinan, yaitu: (1) Perilaku yang diperoleh dari keturunan dalam bentuk insting

biologis (*nature*); dan (2) Perilaku yang diperoleh dari hasil pengalaman yang dipengaruhi oleh lingkungan (*nurture*).

Peneliti berfokus pada perilaku sosial yang dimiliki oleh wisatawan asing yang berasal dari negara asal mereka. Tentunya, perilaku sosial antar negara akan memiliki perbedaan yang signifikan. Teori perilaku menyatakan bahwa perilaku sosial dapat diperoleh dari hasil pengalaman yang dipengaruhi oleh lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa wisatawan asing yang berinteraksi langsung dengan masyarakat lokal berpotensi mempengaruhi perilaku masyarakat NTB.

NTB, yang dikenal sebagai Pulau Seribu Masjid (Najamudin, 2018), memiliki masyarakat lokal dengan tingkat religiusitas yang tinggi. Oleh karena itu, kemunculan perilaku sosial yang dibawa oleh wisatawan asing dapat menjadi ancaman bagi keberlangsungan kebudayaan lokal di NTB. Pengaruh perilaku sosial yang dibawa oleh wisatawan asing cenderung memberikan dampak negatif karena terdapat kontradiksi antara perilaku wisatawan asing dengan budaya lokal yang menjunjung tinggi nilai-nilai religiusitas.

Jika budaya asing memiliki potensi untuk mengikis budaya lokal, maka identitas nasional akan hilang. Hilangnya identitas nasional sebagai akibat dari pengaruh budaya asing adalah ancaman bagi dimensi sosial-budaya yang harus diatasi secara tepat dan efektif oleh pemerintah. Apabila ancaman dimensi sosial-budaya tidak ditangani, dapat mengganggu keamanan nasional. Oleh karena itu, pemerintah harus merumuskan strategi yang tepat untuk mengatasi ancaman terhadap dimensi sosial-budaya ini guna melestarikan budaya lokal di NTB.

Strategi Pemerintah dalam Mencegah Ancaman Konflik Warga Negara Asing dan Masyarakat NTB

Secara etimologi, pengertian strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *stratego* yang berarti merencanakan pemusnahan musuh dengan menggunakan sumber daya yang efektif (Arsyad, 2002). Dalam terminologi, strategi diartikan sebagai seni atau ilmu menggunakan sumber daya alam atau manusia untuk melaksanakan kebijakan tertentu (KBBI, 2002).

Strategi dapat dijelaskan sebagai suatu usaha dan cara berpikir untuk merencanakan sesuatu dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan, sehingga kerap kali dikaitkan dengan politik atau kekuasaan. Selain itu, strategi juga dapat diartikan sebagai penjaga keseimbangan antara tujuan, cara, dan kemampuan yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini, strategi dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk mengidentifikasi tujuan, mengelola sumber daya dan kemampuan, serta menentukan metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Art Lykke menjelaskan upaya dalam menentukan strategi dapat dicapai dengan memahami tujuan (*ends*) yang berfungsi untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai; kemudian terdapat rencana (*ways*) yang berfungsi guna menjawab penggunaan sumber daya secara cepat dan tepat; lalu adanya sumber daya (*means*) yang berfungsi dalam menjelaskan penggunaan sumber daya pada eksekusi rencana yang direncanakan; dan juga resiko (*risk*) yang berfungsi guna mengetahui jarak antara tujuan, konsep dan kesediaan suatu sumber daya dengan hubungan antara tujuan, rencana, sumber daya serta resiko (Bartholomees, 2010).

Untuk dapat menganalisa tujuan, rencana dan sumber daya yang telah dijelaskan Art Lykke, terdapat kriteria skala pengukuran, meliputi: kesesuaian (*suitability*), mengukur tingkat kelayakan (*feasibility*) dan hal yang dapat diterima (*acceptability*). Hal demikian artinya kesesuaian strategi dengan kepentingan nasional dan kekuatan nasional sesuai dengan

keadaan yang kita alami dan juga potensi yang mengakibatkan munculnya dampak ketika strategi tersebut diimplementasikan.

Teori strategi dari Art Lykke dapat menjadi landasan untuk menjelaskan strategi yang akan diterapkan dalam upaya pencegahan ancaman konflik antara warga negara asing dan masyarakat NTB, terutama yang berkaitan dengan potensi pergeseran budaya lokal yang tergantikan oleh budaya asing yang dibawa oleh wisatawan asing. Dalam konteks ini, implementasi teori ini membutuhkan tiga elemen strategis, yaitu tujuan (*ends*), rencana (*ways*), dan sumber daya (*means*). Tujuan (*ends*) digunakan untuk memandu pemerintah dalam upaya mencegah potensi konflik warga negara asing di NTB. Rencana (*ways*) meliputi optimalisasi keterlibatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) NTB dan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Sedangkan sumber daya (*means*) membutuhkan sinergi antara lembaga-lembaga terkait dengan masyarakat NTB. Dengan mengimplementasikan strategi ini, diharapkan NTB dapat meminimalisir risiko terjadinya konflik dan mempromosikan kerukunan antara warga asing dan masyarakat NTB.

Kesbangpol pada pengawasan orang asing dinaungi oleh Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik. Bidang ini memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas pada kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, memfasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 49 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Nusa Tenggara Barat, berkaitan dengan Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik bertugas menyusun bahan/materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dibidang di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai peraturan perundang-undangan meliputi: Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen, serta Penanganan Konflik.

Selain itu, dalam upayanya untuk memantau orang asing guna meminimalisir potensi konflik, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat membentuk Tim Pemantau Orang Asing (TIPOA) bekerja untuk memantau dan memonitor kegiatan orang asing. TIPOA merupakan tim gabungan dengan beranggotakan *stakeholder* lembaga lainnya termasuk Kesbangpol. Selain TIPOA, ada juga Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

TIMPORA merupakan tim gabungan yang terdiri dari beberapa instansi atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas serta fungsi yang berkaitan dengan keberadaan serta kegiatan yang dilakukan orang asing. Lembaga pemerintahan yang menjadi anggota dalam TIMPORA pada ruang lingkup provinsi meliputi: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham); Kepolisian Daerah (POLDA); Pemerintah Daerah; BNN-P; BIN Daerah; KODAM/KOREM; LANUD; LANAL; KEJATI; serta Kantor Wilayah Pajak (Kanwil Pajak).

TIMPORA melakukan dua jenis pengawasan, yaitu Pengawasan Administratif dan Pengawasan Lapangan. Pengawasan Administratif dilakukan saat permohonan terkait administrasi seperti VISA, surat perijinan bagi orang asing, dan perpanjangan ijin tinggal bagi orang asing. Sementara itu, pengawasan lapangan dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di Indonesia, termasuk di hotel, tempat hiburan, dan perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan orang asing. Dengan demikian peneliti menyoroti terdapat 2 lembaga atau 2 Tim khusus yang memiliki tanggung jawab dalam pencegahan konflik warga negara asing dan masyarakat NTB.

Dalam konsep Damai dan Resolusi Konflik, terdapat teori yang dapat diimplementasikan dalam tindakan preventif dalam pencegahan konflik yakni teori *Conflict Early Warning Response System* (CEWERS). Teori CEWERS (Ichsan Malik, 2017) merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mendeteksi secara dini potensi konflik atau ancaman keamanan nasional yang muncul di suatu wilayah atau negara tertentu, sehingga dapat dilakukan tindakan preventif untuk mengurangi dampaknya.

CEWERS biasanya mencakup pengumpulan data dan analisis untuk memperkirakan kemungkinan timbulnya konflik atau ancaman keamanan nasional, serta memberikan saran serta rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait dalam mencegah dan menangani konflik atau ancaman keamanan tersebut. CEWERS bertujuan untuk meminimalisir kerugian serta mempercepat respon terhadap ancaman konflik atau ancaman keamanan nasional yang muncul. Sistem ini dapat digunakan oleh berbagai pihak, baik itu pemerintah, masyarakat sipil, maupun organisasi internasional yang memiliki kepentingan dalam keamanan dan perdamaian dunia.

Dengan adanya CEWERS, diharapkan dapat memperkuat upaya-upaya dalam mencegah konflik dan mengatasi dampak-dampak yang ditimbulkannya secara lebih efektif dan efisien. Teori CEWERS ini kemudian dapat diaplikasikan sebagai strategi pemerintah dalam upaya pencegahan ancaman konflik warga negara asing di NTB. Implementasi teori CEWERS ini telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di mana Pemerintah memiliki program unggulan yang menjadi upaya untuk pencegahan konflik yang terjadi atas derasnya arus kedatangan orang asing.

Banyak desa-desa di NTB yang setiap hari banyak dikunjungi wisatawan asing. Kesbangpol yang tergabung dalam Pemerintah Daerah Provinsi NTB mencanangkan konsep kampung madani. Kampung Madani merupakan kampung atau desa wisata yang menerima wisatawan asing yang datang dengan senantiasa menjunjung tinggi kearifan lokal. Upaya ini dilakukan agar Nusa Tenggara Barat senantiasa mempertahankan jati diri sebagai daerah yang terkenal dengan kearifan lokal yang kental. (wawancara dengan Lalu Abdul Wahid S.H., M.H., (Kepala Kesbangpol NTB) pada Senin tanggal 27 Februari 2023)

Tabel.2 Data kampung madani pada provinsi Nusa Tenggara Barat

No.	Desa	Kabupaten	Tahapan Kegiatan
1.	Kuta	Lombok Tengah	Pencetakan buku awig-awig kampung madani
2.	Sesait	Lombok Utara	Pencetakan kitab hukum adat wet sesait
3.	Bukit Damai	Sumbawa	Sosialisasi
4.	Doropeti	Dompu	Sosialisasi

(Data diambil dari Kesbangpol NTB)

Berbeda halnya dengan upaya Pemerintah Provinsi NTB dengan Kesbangpol, TIMPORA juga melakukan upaya dalam mencegah konflik warga negara asing dengan masyarakat NTB dengan cara memperkuat keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan orang asing menjadi peran penting, pasalnya pemerintah tidak dapat bekerja secara maksimal apabila tanpa bantuan dari masyarakat. Pada pengawasan orang asing, masyarakat bertindak sebagai mitra kerja TIMPORA. Dalam hal ini juga terdapat anggaran untuk informan, di mana TIMPORA senantiasa menghimpun informasi yang berkaitan dengan orang asing yang akan melanggar peraturan atau mengganggu keamanan. (wawancara dengan

Ngurah Mas Wijaya Kusuma, S.H., M.H., (Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham NTB) pada Kamis tanggal 2 Maret 2023)

TIMPORA juga senantiasa berkoordinasi dengan pihak keamanan setempat seperti Babinsa dan Babinkamtibmas, sehingga ketika muncul permasalahan sekecil apapun akan segera disampaikan kepada pimpinan TIMPORA untuk menemukan solusinya. Hal ini menjadikan peranan masyarakat sangat penting dalam pengawasan orang asing ini. Bahkan ketika ada permasalahan orang asing yang cukup insidental, TIMPORA akan mengundang tokoh masyarakat untuk menghimpun informasi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.

Dalam upaya pencegahan ancaman konflik warga negara asing dan masyarakat NTB ini, pihak kepolisian daerah (POLDA) yang merupakan salah satu bagian dari TIMPORA yang memiliki tanggung jawab atas keamanan juga melakukan upaya pencegahan dengan cara melakukan patroli.

Patroli yang merupakan satu hal yang penting sebagai upaya preventif (pencegahan) di mana contohnya yang di kafe-kafe, mereka (orang asing) memiliki kebiasaan hingga larut malam. Kami memberikan rasa keamanan dengan melakukan patroli di malam hari. Hal ini terbukti dapat meminimalisir konflik antara warga negara asing dengan masyarakat NTB. Kami (POLDA) senantiasa menghimbau pada masyarakat serta melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat setempat agar menghimbau masyarakat NTB untuk tidak melakukan tindakan yang mengganggu kenyamanan wisatawan asing. Mereka (masyarakat NTB) bergantung hidupnya dari wisatawan luar, hal ini menjadikan konflik tidak terjadi. (wawancara dengan Kombespol Hendro Kusmayadi, S.IK., M.H. (Direktur Intelkam Polda NTB) pada Selasa tanggal 28 Februari 2023).

Demikian strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya pencegahan ancaman konflik antara warga negara asing dan masyarakat NTB, terutama yang berkaitan dengan potensi pergeseran budaya lokal yang tergantikan oleh budaya asing yang dibawa oleh wisatawan asing.

KESIMPULAN

Nusa Tenggara Barat memiliki potensi pariwisata yang cukup menjanjikan dengan keindahan alamnya yang memiliki perpaduan antara pantai dan pegunungan serta keragaman seni budayanya, sehingga daerah ini menjadi salah satu destinasi wisata yang ideal. Pengembangan sektor pariwisata di NTB memiliki dampak positif dan negatif, di mana dampak positifnya dapat meningkatkan pendapatan daerah dan perekonomian masyarakat NTB, namun dampak negatifnya memunculkan potensi konflik yang ditimbulkan oleh wisatawan asing berupa perilaku sosial yang mereka bawa dari negara asalnya yang memiliki perbedaan yang signifikan dengan budaya lokal di NTB.

Pergeseran perilaku sosial masyarakat NTB berpotensi menghilangkan identitas nasional pengaruh budaya asing merupakan ancaman bagi dimensi sosial-budaya yang harus ditangani dengan strategi yang tepat dan efektif oleh Pemerintah Daerah NTB. Ancaman terhadap dimensi sosial-budaya yang tidak ditangani dapat mengganggu keamanan nasional, maka Pemerintah harus mengatasi ancaman ini guna melestarikan budaya lokal di NTB.

Strategi pemerintah dalam mencegah ancaman konflik yang disebabkan oleh warga negara asing di NTB untuk menjaga keamanan nasional, dengan cara: Pemerintah Provinsi NTB berkolaborasi dengan Kesbangpol dengan cara membangun desa madani sebagai upaya melestarikan budaya lokal; TIMPORA menggandeng masyarakat sebagai mitra mereka dalam upaya pengawasan orang asing; serta Polda senantiasa melakukan patroli rutin dan berkomunikasi dengan tokoh masyarakat setempat guna mencegah eskalasi konflik.

REKOMENDASI

Dari penelitian ini, peneliti merekomendasikan untuk:

1. Meningkatkan sinergitas antara stakeholder terkait dalam upaya pencegahan konflik warga negara asing dengan masyarakat NTB.
2. Melakukan pendekatan dengan masyarakat yang bersentuhan langsung dengan wisatawan asing untuk menguatkan identitas nasional guna mempertahankan budaya lokal NTB.
3. Melakukan sosialisasi pentingnya menjaga budaya lokal pada generasi muda di NTB sebagai upaya melestarikan budaya lokal agar generasi muda tidak terpengaruh budaya asing yang mengakibatkan hilangnya identitas nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Azhar. 2002. Media Pembelajaran, edisi 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah NTB
- Departemen pendidikan dan kebudayaan RI. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Logos
- Hurlock. 2003. Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Jakarta: Erlangga.
- Kanca, I Nyoman & I Nengah wijaya. 2019. Pembangunan Pariwisata Global Di Bali dalam Jurnal Media Bina Ilmiah Vol.13 No.10.
- Kastolani, dan Ardiyanto. 2017. "Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan". Diponegoro journal of accounting. Vol. 6 No. 3 2017.
- Kombespol Hendro Kusmayadi, S.IK., M.H. (Direktur Intelkam Polda NTB);
- Lalu Abdul Wahid S.H., M.H., (Kepala Kesbangpol NTB);
- Malik, Ichsan. 2017. Resolusi Konflik: Jembatan Perdamaian. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Mardawani. 2020. Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif. Yogyakarta: Deepublish.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications.
- Najamudin. 2018. Resolusi Konflik Pembangunan Islamic Center Dan Masjid At-Taqwa Mataram dalam Jurnal Komunike Volume X, No. 2, Desember 2018.
- Ngurah Mas Wijaya Kusuma, S.H., M.H., (Kepala Bidang Intelejen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham NTB)
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 49 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Nusa Tenggara Barat
- Raffiuddin dan Maman Abd Djalil. 2002. Prinsip dan Strategi Dakwah. Bandung: Pustaka Setia
- Riduan, 2013. Metode dan teknik menyusun tesis, Bandung: Alfabeta.
- Sjahriful, Abdullah. 1993. Memperkenalkan Hukum Keimigrasian. Jakarta: Ghalia.
- Statistik Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Stedward, G. 1997. On the record : an introduction to interviewing' dalam buku surviving the reaserch Process in Politics, burnham (ed.) London: Pinter.
- Tutik, Titik Triwulan. 2008. Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta: Cerdas Pustaka.
- Undang-undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan